



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SOSIAL  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : MIRA RIYATI KURNIASIH
- Jabatan : DIREKTUR
- NHK : 91997

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.944.750.000

- Tanah Seluas 477 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 71.550.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , LAINNYA Rp. 2.000.000.000
- Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 73.200.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 21.000.000

- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA B3B AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 12.800.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 202.475.935

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 179.375.000

**Sub Total**

Rp. 3.360.400.935

**III. HUTANG**

Rp. 39.921.344

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.320.479.591

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.